



# POHON KINERJA TAHUN 2021 - 2026

## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG



VISI

**REMBANG GEMILANG 2026**

MISI III

**Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**

**TUJUAN DAERAH**

**Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah**



**SASARAN DAERAH**

**Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur**



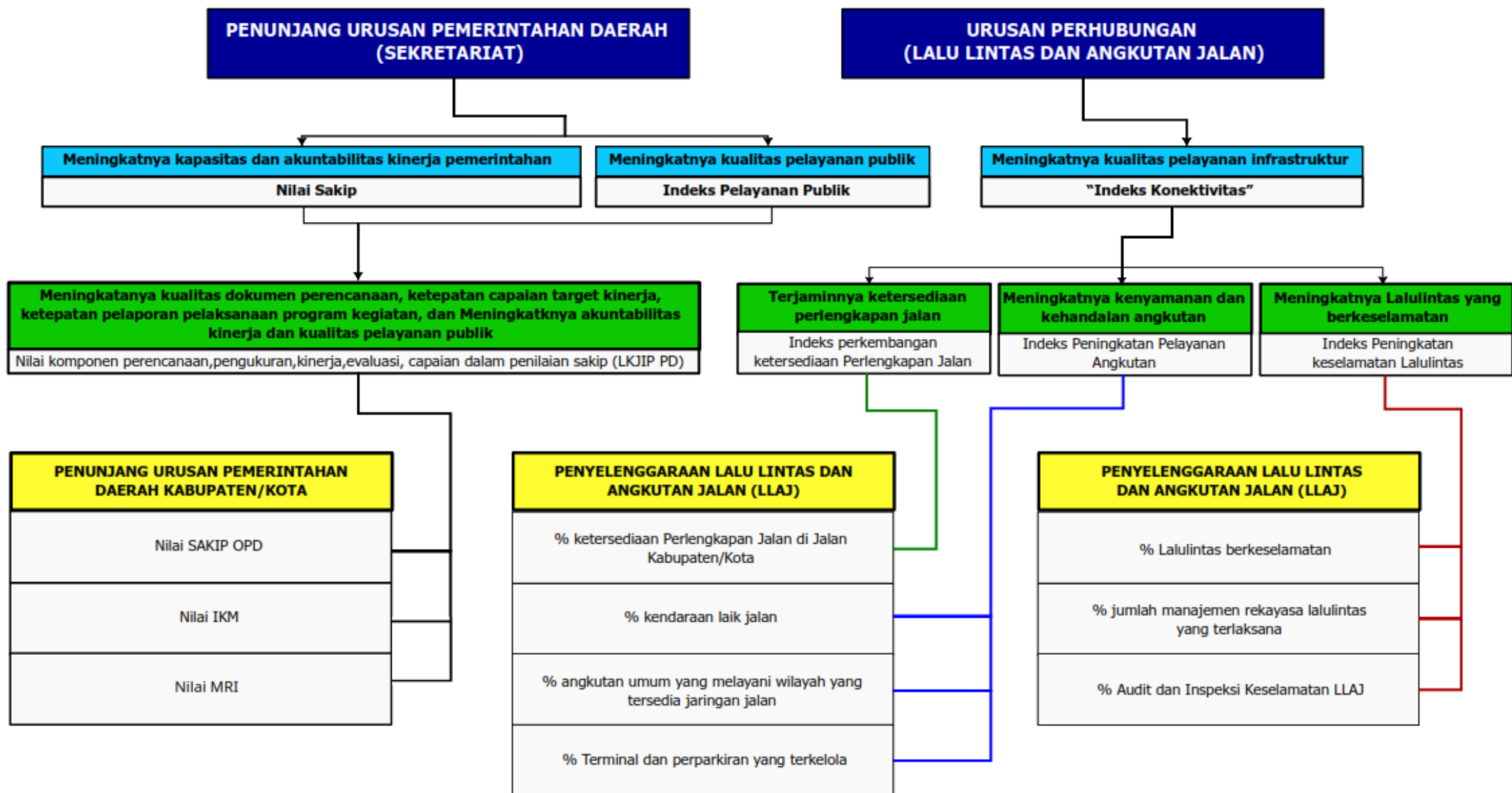
**TUJUAN DISHUB**

**Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur**



**SASARAN DISHUB**

- 1. Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan**
- 2. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan**
- 3. Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan**



**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SEKRETARIAT)**

**URUSAN PERHUBUNGAN (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)**

**Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan**  
Nilai Sakip

**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**  
Indeks Pelayanan Publik

**Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur**  
"Indeks Konektivitas"

**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik**  
Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)

**Terjaminnya ketersediaan pertengkapan jalan**  
Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan

**Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan**  
Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan

**Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan**  
Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas

**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Nilai SAKIP OPD

Nilai IKM

Nilai MRI

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

% ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

% kendaraan laik jalan

% angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan

% Terminal dan perparkiran yang terkelola

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

% Lalulintas berkeselamatan

% jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana

% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Nilai SAKIP OPD      Nilai IKM

**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**  
Jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik

**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**  
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**  
Jumlah dok anggaran yang disusun
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD**
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  
Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**  
Jumlah administrasi keuangan yang tersedia
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**  
Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**  
Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**  
Jumlah Dokumen BMD

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**  
jumlah pengadaan pakaian PDH,PDL,olahraga
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**  
jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang terlaksana

**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Nilai SAKIP OPD

Nilai IKM

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
jumlah Penyediaan Komponen Instalasi

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan/Material  
Jumlah Penyediaan Bahan/Material

Fasilitas Kunjungan Tamu  
Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Alat Besar  
Jumlah Pengadaan Alat Besar

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor  
Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Pengadaan Mebel  
Jumlah Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
jumlah jasa surat menyurat yang tersedia

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
jumlah tagihan rekening yang terbayar

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertzinan Alat Besar  
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertzinan Alat Besar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertzinan Alat Besar  
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertzinan Alat Besar

Pemeliharaan Mebel  
Jumlah Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana  
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

# PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

% ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

% kendaraan laik jalan

% angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan

## Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia

Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpelihara

### Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

### Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

### Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah macam Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

### Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah macam Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

DPUTARU

## Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan yang diuji

### Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

### Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kementerian Perhubungan

## Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

## Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

### Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

% angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan

% Terminal dan Perparkiran yang Terkelola

**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Terkelola

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Pembangunan Gedung Terminal

Jumlah Pembangunan Gedung Terminal

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

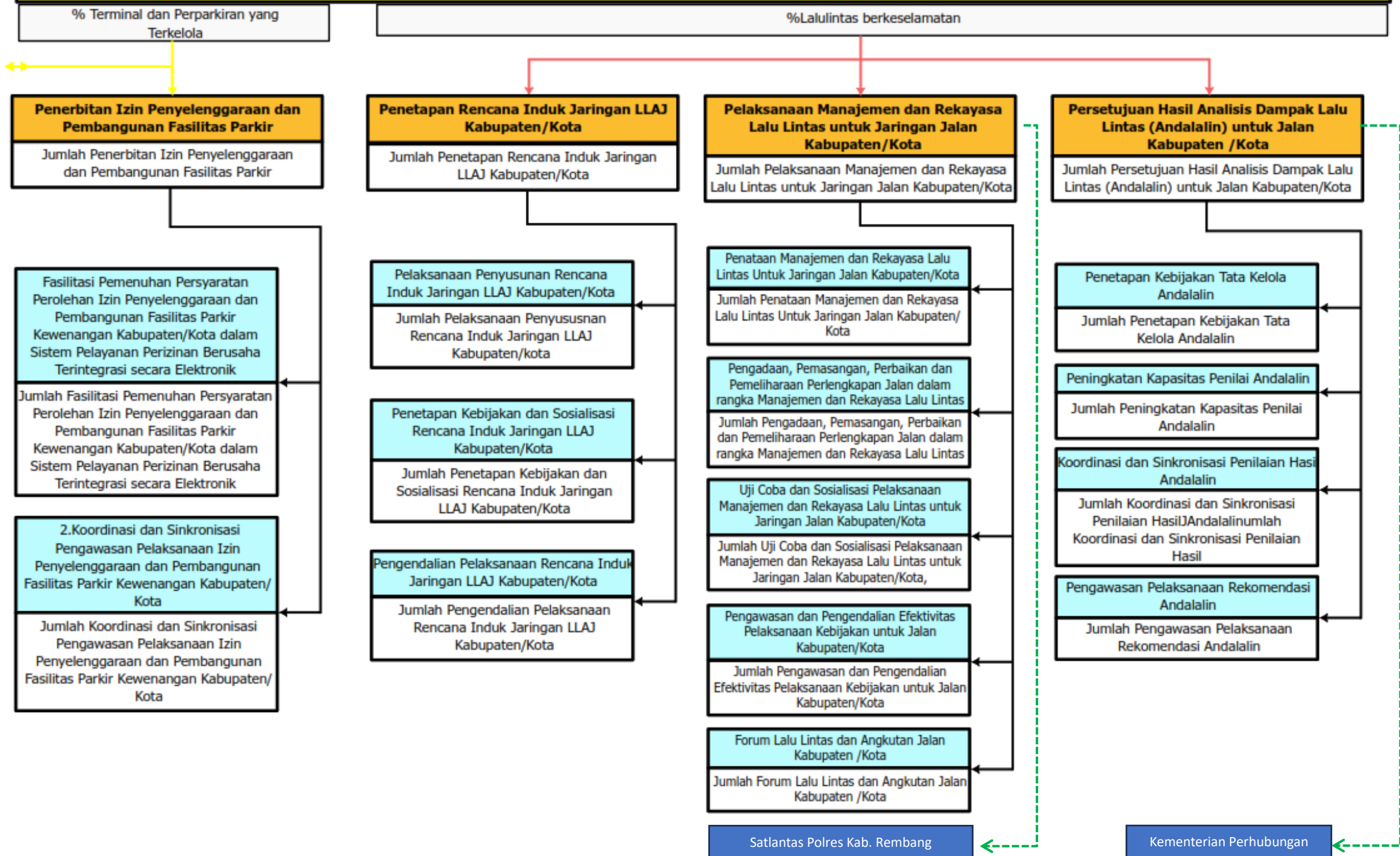
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**



**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

% jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana

% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**  
Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**  
Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota  
Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan  
Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

**3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**  
Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota  
Jumlah Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota  
Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**  
Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ  
Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  
Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal  
Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota  
Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  
Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum